

ABSTRAK

Dilihat dari konteks sosial dan politik di Kota Palembang, terdapat berbagai isu dan tantangan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban. Contohnya, menjamurnya para pengemis, pengamen, gelandangan, anak jalanan ataupun juga pedagang kaki lima yang kerap mengganggu aktivitas secara normal. Pemerintah Kota Palembang telah membuat peraturan dengan maksud tujuan untuk mengatur dan menertibkan masyarakat Kota Palembang guna menciptakan kenyamanan. Penelitian ini mengkaji kebijakan ketentraman dan ketertiban di Kota Palembang dalam sudut pandang Politik Islam. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan teknik analisis data yang dideskripsikan secara naratif. Sumber data primer penelitian ini dari Buku Al-Ahkam As-Sulthanniyah karya Imam Al-Mawardi. Selain itu data yang penulis dapatkan yaitu melalui studi dokumen dari berbagai jurnal, buku dan artikel. Adapun hasil penelitian ini mendeskripsikan bagaimana kebijakan ketentraman dan ketertiban yang dibuat di Kota Palembang yang terdiri dari penertiban pedagang kaki lima (PKL), penertiban gelandangan, anak jalanan dan pengemis, dan juga pembatasan kegiatan malam tahun baru. Selain itu penelitian ini mendapatkan hasil bagaimana kebijakan tersebut dalam sudut pandang Politik Islam yaitu dalam konteks kebijakan di Kota Palembang dalam sudut pandang politik Islam Al-Mawardi dalam bukunya “Al-Ahkam As-Sulthaniyyah” memberikan pandangan yang sangat relevan dan memiliki substansi. Imam al-Mawardi menekankan bahwa pemerintah memiliki wewenang dalam mengatur kebijakan terhadap fasilitas umum guna menciptakan ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat. Wewenang pengaturannya atas fasilitas ini terbatas pada melarang mereka untuk bertindak berlebihan dan mencegah mereka membuat kerusakan, serta mendamaikan mereka saat terjadi perselisihan.

Kata Kunci : *Kebijakan, Ketentraman dan Ketertiban, Politik Islam*

ABSTRACT

Judging from the social and political context in the city of Palembang, there are various issues and challenges related to peace and order. For example, the proliferation of beggars, buskers, homeless people, street children and street vendors often disrupt normal activities. The Palembang city government has made regulations with the aim of regulating and ordering the people of Palembang city in order to create comfort. This research examines peace and order policies in the city of Palembang from an Islamic political perspective. The type of research used is qualitative research with data analysis techniques described narratively. The primary data source for this research is the book Al-Ahkam As-Sulthaniyyah by Imam Al-Mawardi. Apart from that, the data that the author obtained was through studying documents from various journals, books and articles. The results of this research describe the peace and order policies created in Palembang City, which consist of controlling street vendors, controlling homeless people, street children and beggars, and also limiting New Year's Eve activities. Apart from that, this research obtained results about how these policies are from an Islamic political perspective, namely in the context of policy in Palembang City from an Islamic political perspective. Al-Mawardi in his book "Al-Ahkam As-Sulthaniyyah" provides views that are very relevant and have substance. Imam al-Mawardi emphasized that the government has the authority to regulate policies regarding public facilities in order to create peace and order in society. Its regulatory authority over these facilities is limited to prohibiting them from overreacting and preventing them from causing damage, as well as reconciling them when disputes arise.

Keywords: *Policy, Peace and Order, Islamic Politics*